

KINERJA PEMBIAYAAN PERIKANAN SKALA KECIL DI KOTA TEGAL, JAWA TENGAH

*(Performance of Small Scale Fisheries Financing in Tegal City,
Central Java)*

Oleh:

Prabowo^{1*}, Eko Sri Wiyono², John Haluan², Budhi Hascaryo Iskandar²

¹PT Multi Buana Group

² Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB

* Korespondensi: prabowo.sp15@gmail.com

Diterima: 15 Mei 2012; Disetujui: 2 November 2012

ABSTRACT

Small scale fisheries which managed by the local coastal communities are some whom rarely access financing from Banks, even though numbers of small scale fisheries are quite substantial, reaching around 26,2 million units. This circumstance happens due to lack of interaction between the stakeholders and other related components in supporting fisheries financing performance. This research aims to analyze interaction between financing components which significantly influent to the financing performance of small scale fisheries in city Tegal. Structural Equation modeling (SEM) is used in this research. Result of the analysis evinces that the role of banking institutions affected the up and down of the financing performance. However political policies, performance of the small scale fisheries, and the role of government policies are not significantly influencing financing performance. In the technical level, the distribution of Bank's financing by general bank (BRI and BPD) are significantly supported the role of Banking and able to increase financing performance, while BPR has not yet significantly influencing the financing performance. In relation to the type of financing/ credit, KKPE has discerned benefits to the small scale fisheries, while KUR and BPLM has not yet felt benefitting to the increase of financing to small scale fisheries in Tegal. Counseling program, technical support, and assistance from KKP RI are significantly supported the increase of small scale fisheries financing performance in Tegal. Except for NPV, the favorable value of Net B/C, IRR and ROI could increase both the productivity and financing performance of small scale fisheries.

Key words: *financing, performance, significant, small scale fisheries*

ABSTRAK

Usaha perikanan skala kecil yang dikelola oleh masyarakat pesisir termasuk yang paling kecil mengakses kredit atau pembiayaan perbankan, padahal jumlah usaha skala kecil pada bidang perikanan ini cukup besar, yaitu mencapai 26,2 juta unit. Kondisi ini tidak lepas dari belum efektifnya interaksi *stakeholders* dan komponen terkait dalam mendukung kinerja pembiayaan perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi komponen pembiayaan yang signifikan mempengaruhi kinerja pembiayaan perikanan skala kecil di Kota Tegal. Penelitian ini menggunakan metode *structural equation modeling* (SEM). Hasil analisis menunjukkan peran lembaga perbankan signifikan mempengaruhi naik-turunnya kinerja pembiayaan, sedangkan kebijakan politik, *performance* usaha perikanan skala kecil, dan peran lembaga pemerintah tidak signifikan. Pada tataran teknis, penyaluran kredit/pembiayaan oleh bank umum (BRI dan BPD) secara signifikan mendukung peran lembaga perbankan dan dapat meningkatkan kinerja pembiayaan, sedangkan BPR belum. Terkait jenis kredit/pembiayaan, yang signifikan dirasakan manfaatnya oleh nelayan kecil adalah kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE), sedangkan

kegiatan usaha kecil (KUR) dan bantuan pinjaman langsung masyarakat (BPLM) belum signifikan dirasakan manfaatnya meningkatkan pembiayaan perikanan skala kecil Kota Tegal. Program penyuluhan, bimbingan teknis, dan pendampingan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP RI) signifikan membantu peningkatan kinerja pembiayaan perikanan skala kecil di Kota Tegal. Nilai *Net B/C*, *IRR*, dan *ROI* yang baik signifikan dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja pembiayaan perikanan skala kecil, sedangkan nilai *NPV* tidak.

Kata kunci: pembiayaan, kinerja, signifikan, perikanan skala kecil

PENDAHULUAN

Badan Pusat Statistik (2010) menyatakan bahwa jumlah pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) saat ini ada sebanyak 49,8 juta unit usaha atau 99,99% dari jumlah pelaku usaha. Dengan rincian, usaha besar sebanyak 4,52 ribu atau 0,01%, usaha menengah sebanyak 120,25 ribu atau 0,24%, usaha kecil sebanyak 2,02 juta atau 4,05% dan usaha mikro sebanyak 47,70 juta atau 95,70%. Jumlah usaha mikro dan kecil adalah sebanyak 49,72 juta unit usaha, atau mewakili 99,84% dari jumlah pelaku usaha. Menurut Wicaksono (2012) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2010), hanya sekitar 13% usaha skala kecil termasuk perikanan (dari total 54 juta usaha pada tahun 2012) yang mampu mengakses pembiayaan perbankan, sedangkan yang 87% nya mengandalkan modal sendiri. Usaha perikanan skala kecil yang dikelola oleh masyarakat pesisir termasuk yang paling kecil mengakses kredit atau pembiayaan tersebut, padahal jumlah usaha skala kecil pada bidang perikanan ini mencapai 26,2 juta unit. Penyerapan kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) sebagai program unggulan dari Kabinet Indonesia Bersatu, baru mencapai 3%, padahal setiap kementerian mencanangkannya. Kondisi ini tidak lepas dari belum efektifnya interaksi *stakeholders* dan komponen terkait dalam mendukung kinerja pembiayaan perikanan skala kecil di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam konteks kontribusi ekonomi dan kesejahteraan, komponen dan *stakeholders* pembiayaan seyogyanya mendukung usaha perikanan skala kecil Kota Tegal, sehingga lebih efisien, komersial, dan dapat dikelola dengan pola pembiayaan yang lebih baik. Cantrang dan jaring arad merupakan usaha perikanan yang paling dominan (80-90%) di Kota Tegal (Imron 2008). Usaha perikanan skala besar ataupun skala industri umumnya menggunakan modal yang besar, alat tangkap yang lebih besar dengan teknologi yang lebih canggih, administrasi dan pola pembiayaan yang lebih baik, serta dikelola dengan manajemen usaha yang lebih profesional. Adapun usaha perikanan skala kecil, modalnya kecil, biasanya modal perorangan, alat tangkap tidak

begitu besar dan teknologi yang digunakan minimal, pola pembiayaan yang tergantung pada kondisi sebelumnya, serta dikelola dalam skala keluarga atau kelompok nelayan kecil (Cochrane 2002 dan Elfindri 2002). Hal ini menjadi tantangan besar untuk menyelaraskan interaksi *stakeholders* dan komponen pembiayaan, sehingga mendukung kinerja pembiayaan perikanan skala kecil di Kota Tegal. Signifikansi interaksi perlu diketahui untuk menentukan tindakan pengelolaan yang tepat sehingga kinerja pembiayaan yang ada lebih baik.

Penelitian ini bertujuan menganalisis interaksi komponen pembiayaan yang signifikan mempengaruhi kinerja pembiayaan perikanan skala kecil di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan selama enam bulan dimulai dari bulan April-September 2011. Lokasi penelitian adalah di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Pengambilan data dilakukan di beberapa lokasi yang menjadi sentra kegiatan perikanan skala kecil di Kota Tegal, yaitu Tegalsari, Pelabuhan, dan Krandon.

Secara umum, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dan sekunder tersebut meliputi: Jenis lembaga perbankan yang terlibat pembiayaan di Kota Tegal; Data terkait upaya peningkatan *performance* usaha perikanan skala kecil di Kota Tegal; Data peran setiap lembaga pemerintah (KKP RI, PEMDA Kota Tegal, BAPPEDA Kota Tegal) dalam pembiayaan perikanan; Data kinerja pembiayaan saat ini; Jenis kredit/pembiayaan yang bisa dimanfaatkan usaha perikanan skala kecil di Kota Tegal dan realisasinya; Data kebijakan politik terkait kredit atau pembiayaan, dan lainnya.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan pengamatan langsung. Dalam wawancara, data diperoleh dari sejumlah responden di lokasi. Wawancara ini menggunakan kuesioner yang terfokus pada jenis data yang akan dikumpulkan. Jumlah responden untuk analisis kinerja pembiayaan perikanan skala kecil

sekitar 184 orang. Jumlah responden ini sesuai dengan kebutuhan metode estimasi *maximum likelihood (ML)* yang dianut dalam penelitian ini. Menurut Ferdinand (2002), metode estimasi *ML* membutuhkan jumlah sampel sekitar 100-200 sampel. Penentuan jumlah responden tersebut dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan populasi kelompok *stakeholders* dan keterkaitan langsung dengan kegiatan perikanan skala kecil.

Data sekunder diperoleh dari penelaahan studi kasus, literatur, dan kombinasi keduanya. Penelaahan dilakukan terhadap laporan statistik perikanan, hasil studi dan kegiatan pengembangan yang diprogramkan oleh instansi terkait, dan lain-lain. Instansi tempat pengumpulan data sekunder diantaranya DPKP Kota Tegal, BAPPEDA, PPP Tegalsari, dan KKP RI.

Kajian teoritis dan pengembangan Path Diagram

Pengembangan sistem secara teoritis merupakan upaya pengembangan struktur interaksi dari beberapa faktor yang menjadi lingkup pengukuran kinerja pembiayaan perikanan skala kecil. Tahap ini menjadi penting karena merupakan landasan awal pengembangan sistem untuk memenuhi kaidah-kaidah ilmiah dan teoritis terkait lingkup penelitian yang dilakukan. *Path diagram* merupakan kegiatan penggambaran interaksi faktor-faktor yang terpilih ke dalam ilustrasi diagram. Dalam analisis SEM, komponen yang berinteraksi tersebut kemudian disebut konstruk penelitian, dan setiap konstruk kemudian dilengkapi dengan dimensi-dimensi konstruk. Pengembangan *path diagram* dilakukan dengan menggunakan program AMOS 5 Professional. Perumusan model matematis dan pemilihan teknis estimasi

Secara umum, rumusan matematis dari *path diagram* yang dikembangkan ada dua jenis, yaitu persamaan pengukuran (*measurement model*) dan persamaan struktur (*structural equation*). Persamaan pengukuran (*measurement model*) merupakan persamaan yang mewakili interaksi dimensi konstruk dengan konstruksinya. Konstruk merupakan komponen utama yang berinteraksi dalam pembiayaan perikanan skala kecil, sedangkan dimensi konstruksi merupakan komponen tambahan yang akan menjelaskan atau mempertegas interaksi dari suatu konstruk sebagian dari sistem yang multi hubungan atau interaksi. Persamaan struktur (*structural equation*) adalah merupakan persamaan yang mewakili interaksi antara konstruk. Sedangkan teknis estimasi yang dipilih adalah *maximum likelihood (ML)*, karena lingkup penelitian yang termasuk sedang (suatu kawasan/daerah administratif).

Evaluasi kriteria goodness of fit

Tahapan ini merupakan kegiatan mengevaluasi kesesuaian model analisis kinerja pembiayaan yang dibuat menggunakan berbagai kriteria *goodness of fit*. Kriteria *goodness of fit* ini adalah alat uji statistik untuk mengukur tingkat penerimaan model sehingga hasil analisisnya dapat diinterpretasikan atau digunakan (Tabel 1).

Interpretasi hasil

Interpretasi hasil ini merupakan kegiatan menjelaskan kinerja faktor-faktor terkait dalam mendukung pembiayaan perikanan skala kecil di Kota Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Tingkat atau koefisien pengaruh yang diberikan oleh interaksi antar faktor akan mencerminkan tingkat pengaruh yang dihasilkan dari suatu kegiatan pengembangan yang dilakukan terkait pembiayaan perikanan skala kecil di lokasi. Sifat pengaruh (nilai probabilitas) dalam interaksi akan mencerminkan urgensi kegiatan tersebut dalam meningkatkan kinerja pembiayaan perikanan skala kecil sehingga dapat bertahan lama dan lebih dirasakan manfaatnya di lokasi. Bila nilai probabilitas <0,05, maka interaksi signifikan atau kegiatan tersebut penting dalam interaksi pengelolaan.

HASIL

Model struktural kinerja pembiayaan

Kinerja pembiayaan perikanan skala kecil dianalisis menggunakan pendekatan model *structural equation modelling (SEM)*. Berdasarkan hasil kajian teoritis dan identifikasi lapang, komponen-komponen yang terkait dengan kinerja pembiayaan perikanan skala kecil di Kota Tegal adalah politik, lembaga perbankan (L-BANK), *performance* usaha perikanan skala kecil (PER_UPS), lembaga pemerintah (L_PMRTH), dan kinerja pembiayaan (KINERJA_PB). Kebijakan politik tentang pembiayaan dapat mencakup kebijakan kredit usaha kecil (KUR) (X11), kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE) (X12), bantuan pinjaman langsung masyarakat (BPLM) (X13), dan penguatan modal usaha kelompok (PMUK). Lembaga perbankan yang terlibat dapat mencakup bank umum (X21), BPR (X22), dan BPD (X23). *Performance* usaha perikanan skala kecil dapat mencakup NPV (X31), Net B/C (X32), IRR (X33), dan ROI (X34). Lembaga pemerintah yang terkait dapat mencakup KKP RI (X41), DPKP Kota Tegal (X42), dan BAPPEDA Kota Tegal (X43). Adapun kinerja pembiayaan dapat dilihat dari tingkat pendapatan (Y1) dan jumlah kredit (Y2). Gambar 1 menyajikan hasil analisis model struktural akhir kinerja pem-

biayaan usaha perikanan skala kecil di Kota Tegal.

Bila dibandingkan dengan model rancangan *path* diagram, maka model struktural pada Gambar 1 telah mengalami modifikasi lanjut dengan pengembangan 14 *link* baru antar komponen model untuk memanfaatkan *modification index covarian*. Pengembangan *link* dengan meminimalisir kovarian ini dapat menurunkan simpangan model terhadap kenyataan (diwakili oleh data). Hasil uji terhadap kriteria *goodness-of-fit* yang dipersyaratkan untuk model struktural kinerja pembiayaan perikanan skala kecil di Kota Tegal disajikan pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2, hasil *Chi-square* sebagai salah satu kriteria model *fit* menunjukkan penurunan dari 1414,675 pada model sebelumnya menjadi 258,019 pada model struktural akhir ini yang berarti lebih baik dari sebelumnya. Selain itu, jika dilihat dari nilai kriteria *goodness-of-fit* lainnya, yaitu RMSEA=0,106 dan CMIN/DF=3,072, maka model yang dikembangkan dapat dikatakan sudah berada pada jalur kesesuaian (*fitting*). Sedangkan bila dilihat dari nilai GFI=0,876 dan AGFI=0,800, maka model yang dikembangkan sudah memenuhi kriteria *goodness-of-fit* yang dipersyaratkan. Belum tercapainya nilai *significance probability* seperti yang diharapkan tidak menjadi masalah karena sebagian besar kriteria *goodness-of-fit* sudah dipenuhi, dan juga hasil analisis SEM hanya menuntut kemiripan atau model dengan kenyataan. Secara umum, model struktural akhir tersebut sudah masuk jalur kesesuaian (*fitting*), maka model relatif dapat diterima dan dapat digunakan untuk menjelaskan interaksi pembiayaan usaha perikanan skala kecil di Kota Tegal.

Hasil analisis interaksi komponen utama pembiayaan

Model struktural Gambar 1 menunjukkan bahwa komponen utama dan menjadi konstruk model terkait interaksi pembiayaan usaha perikanan skala kecil adalah politik, lembaga perbankan (L-BANK), *performance* usaha perikanan skala kecil (PER_UPS), lembaga pemerintah (L_PMRTH), dan kinerja pembiayaan (KINERJA_PB). Mengacu kepada yang dikembangkan, dalam pembiayaan usaha perikanan skala kecil di Kota Tegal, kinerja pembiayaan (KINERJA_PB) menerima pengaruh atau menjadi tujuan akhir dari interaksi empat komponen utama lainnya. Pada posisi ini, kinerja pembiayaan (KINERJA_PB) menjadi konstruk *eksogen*, sedangkan politik, lembaga perbankan (L-BANK), *performance* usaha perikanan skala kecil (PER_UPS), dan lembaga pemerintah

(L_PMRTH) menjadi konstruk *endogen*. Hasil analisis SEM terkait interaksi lima komponen utama tersebut ditunjukkan pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3, komponen politik cenderung berpengaruh negatif terhadap kinerja pembiayaan usaha perikanan skala kecil di Kota Tegal yang ditunjukkan oleh nilai koefisien (*nk*) interaksi -11,055. Mengacu kepada model struktural II, komponen politik yang dimaksud dapat mencakup kredit usaha Rakyat (KUR), kredit ketahanan pangan dan energi (KKPE), bantuan pinjaman langsung masyarakat (BLPM), dan penguatan modal usaha kelompok (PMUK). Namun demikian pengaruh negatif tersebut belum terlihat jelas/serius (nilai $p > 0,05$). *Performance* usaha perikanan skala kecil (PER_UPS) juga cenderung berpengaruh negatif terhadap kinerja pembiayaan usaha perikanan skala kecil di Kota Tegal ($nk = -1,065$). Pengaruh tersebut mendekati signifikan, ditunjukkan oleh nilai probabilitas (p) mendekati 0,05, yaitu 0,061. Kinerja pembiayaan dipengaruhi secara positif oleh lembaga perbankan (L-BANK) dan lembaga pemerintah (L_PMRTH) yang ditunjukkan oleh nilai koefisien interaksi masing-masing 4,860 dan 1,957.

Berbeda dengan dua komponen utama sebelumnya, lembaga perbankan (L-BANK) dan lembaga pemerintah (L_PMRTH) ini telah menunjukkan peran positif untuk mendukung keberhasilan pembiayaan usaha perikanan skala kecil di Kota Tegal. Dari dua komponen yang berpengaruh positif, baru lembaga perbankan yang perannya signifikan bagi peningkatan kinerja pembiayaan yang ada, yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas (p) < 0,05. Terlepas dari ini, kelima komponen utama tersebut mempunyai pola interaksi tersendiri bagi kelangsungan pembiayaan usaha perikanan skala kecil. Pola interaksi tersebut menjadi arahan penting bagi pengembangan kebijakan pembiayaan pada kemudian hari.

Hasil analisis interaksi komponen pendukung dalam pembiayaan

Berdasarkan Gambar 1, komponen politik diaktualisasi oleh pelaksanaan kredit usaha kecil/KUR (X11), kredit ketahanan pangan dan energi/KKPE (X12), bantuan pinjaman langsung masyarakat/BLPM (X13), dan penguatan modal usaha kelompok/PMUK (X14). Hasil analisis SEM terkait komponen pendukung ini ditunjukkan pada Tabel 4.

Tabel 4 menunjukkan bahwa realisasi kredit usaha kecil/KUR (X11) dan bantuan pinjaman langsung masyarakat/BLPM (X13) belum mendukung secara politik bagi keber-

hasilan pembiayaan (nk X11= -0,792 dan nk X13= -0,809). Pengaruh kedua komponen pendukung ini termasuk yang berdampak nyata, yang ditunjukkan oleh nilai probabilitas di bawah 0,05 (p X11= 0,042 dan p X13= 0,041).

Kredit ketahanan pangan dan energi/KKPE (X12) dan penguatan modal usaha kelompok/PMUK (X14) mendukung secara politik bagi keberhasilan pembiayaan di Kota Tegal yang ditunjukkan oleh nilai koefisien (nk) interaksi masing-masing 5,180 dan 1,000. Namun hanya pengaruh kredit ketahanan pangan dan energi/KKPE (X12) yang berdampak nyata (p X12= 0,005). Tabel 5 menyajikan hasil analisis SEM terkait komponen pendukung lembaga perbankan (L-BANK).

Tabel 5 menunjukkan bahwa bank umum (X21), bank prekreditasi rakyat (X22), dan bank pembangunan daerah (X23) mempengaruhi secara positif peran lembaga perbankan dalam mendukung pembiayaan usaha perikanan skala kecil. Namun demikian, pengaruh nyata baru diberikan oleh bank umum (p X21= 0,001) dan bank pembangunan daerah (p X23= 0,001). Tabel 6 menyajikan hasil analisis SEM terkait komponen pendukung *performance* usaha perikanan skala kecil (PER_UPS). Berdasarkan Tabel 6, *performance* usaha perikanan skala kecil (PER_UPSK), peningkatan nilai NPV (X31), Net B/C (X32), IRR (X33), dan ROI (X34) dapat memperbaiki pola kerja usaha perikanan skala kecil tersebut. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien (nk) interaksi NPV (X31), Net B/C (X32), IRR (X33), dan ROI (X34) terhadap PER_UPSK yang positif. Namun hanya pengaruh Net B/C (X32), IRR (X33), dan ROI (X34) yang dampaknya nyata bagi perbaikan pola kerja usaha perikanan skala kecil Kota Tegal (p masing-masing=0,000). NPV (X31) tidak signifikan memperbaiki pola kerja karena bisa jadi karena syarat NPV masih memperbolehkan penerimaan bersih (*net present*) yang rendah, selama tidak kurang dari 0 (nol). Tabel 7 menyajikan hasil analisis SEM terkait komponen pendukung lembaga pemerintah (L_PMRTH).

Berdasarkan Tabel 7, lembaga pemerintah yang mempunyai keterkaitan (termasuk

pembiayaan) dengan pengelolaan usaha perikanan skala kecil di Kota Tegal adalah KKP RI (X41), DKP Kota Tegal (X42), dan BAPPEDA Kota Tegal (X43). Secara umum, ketiga lembaga tersebut berpengaruh positif (nk>0,000) terhadap peran lembaga pemerintah dalam mendukung pembiayaan usaha perikanan skala kecil di Kota Tegal. Namun baru peran KKP RI (X41) yang dirasakan nyata/signifikan (p= 0,015) yang memberi dampak bagi pembiayaan usaha perikanan skala kecil di Kota Tegal.

Tabel 8 menunjukkan bahwa kinerja pembiayaan dapat direpresentasikan oleh pendapatan dan jumlah kredit. Secara umum, peningkatan pendapatan (Y1) dan jumlah kredit (Y2) akan meningkatkan kinerja pembiayaan (nilai nk>0,000). Namun demikian, hanya peningkatan jumlah kredit (Y2) yang secara nyata dapat memperbaiki kinerja pembiayaan usaha perikanan skala kecil di Kota Tegal. Secara umum, bila pola interaksi komponen pembiayaan tersebut dibaut matriksnya berdasarkan sifat positif dan negatif interaksi serta signifikansinya dalam mendukung pembiayaan perikanan skala kecil di Kota Tegal, maka dapat disajikan seperti pada Tabel 9.

Berdasarkan Tabel 9, sebanyak 15 dari 19 komponen pembiayaan perikanan skala kecil sudah menunjukkan pola interaksi yang positif. Dari komponen yang berinteraksi positif tersebut, 9 diantaranya mempunyai pengaruh signifikan dalam mendukung kinerja pembiayaan perikanan skala kecil di Kota Tegal.

PEMBAHASAN

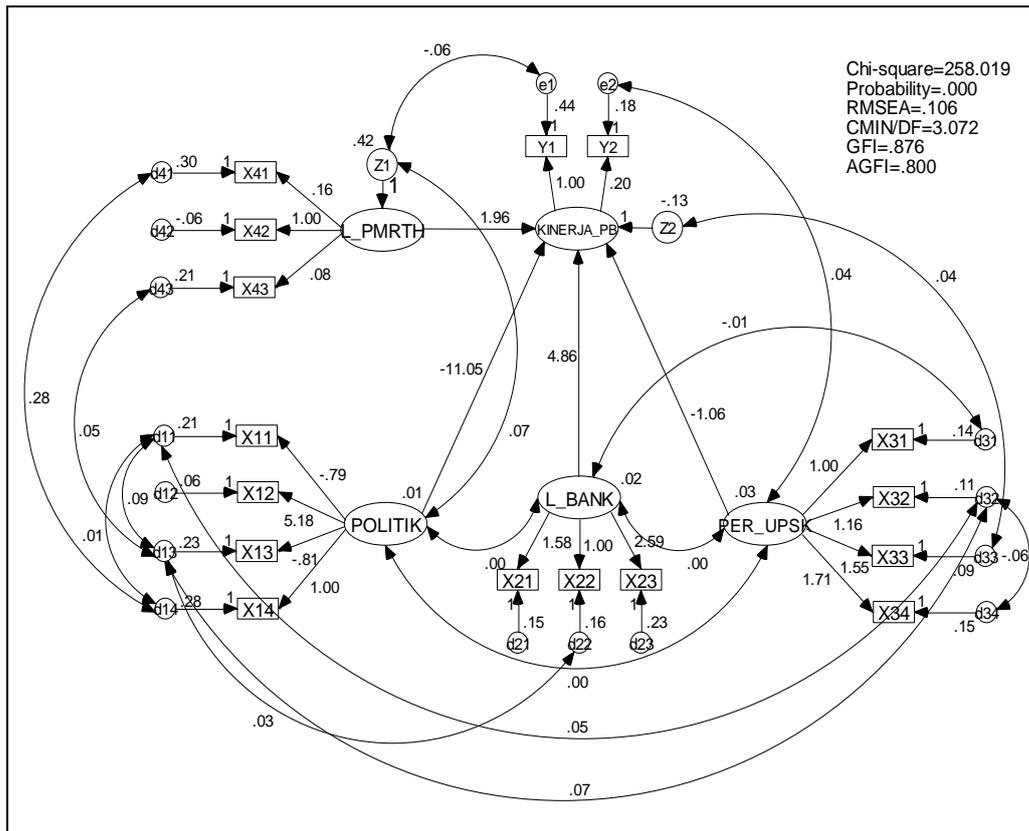
Pola interaksi makro untuk peningkatan kinerja pembiayaan

Hasil analisis pada Tabel 3 menunjukkan bahwa dalam lingkup makro, lembaga perbankan dapat secara signifikan meningkatkan kinerja pembiayaan, sedangkan usaha perikanan skala kecil mendekati signifikan dalam mendukung kinerja pembiayaan. Signifikansi peran lembaga perbankan terhadap peningkatan kinerja pembiayaan di Kota Tegal diduga karena lembaga perbankan baik bank umum,

Tabel 1 Kriteria *goodness-of-fit* dalam analisis SEM

Kriteria <i>Goodness of Fit</i>	Standar
Chi-square	Diharapkan Kecil
Significance Probability (p)	≥ 0,05
RMSEA	≤ 0,08
CMIN/DF	≤ 2,50
GFI	≥ 0,80
AGFI	≥ 0,80

Sumber: Glass (1991) dan Ferdinand (2002) yang dimodifikasi



Gambar 1 Model struktural akhir kinerja pembiayaan perikanan skala kecil di Kota Tegal

Tabel 2 Hasil uji kesesuaian model struktural akhir kinerja pembiayaan perikanan skala kecil terhadap kriteria *goodness-of-fit*

Kriteria <i>Goodness-of-Fit</i>	Syarat	Kinerja Model	Keterangan
<i>Chi-square</i>	Diharapkan Kecil	258,019	Baik
<i>Significance probability</i>	$\geq 0,05$	0,000	Kurang baik
RMSEA	$\leq 0,08$	0,106	Cukup baik
CMIN/DF	$\leq 2,50$	3,072	Cukup baik
GFI	$\geq 0,80$	0,876	Baik
AGFI	$\geq 0,80$	0,800	Baik

Tabel 3 Hasil analisis interaksi komponen utama pembiayaan

Interaksi Komponen	Nk	S.E.	C.R.	P
KINERJA_PB <-- POLITIK	-11,055	10,732	-1,030	0,303
KINERJA_PB <-- PER_UPSK	-1,065	0,567	-1,877	0,061
KINERJA_PB <-- L_BANK	4,860	1,617	3,005	0,003
KINERJA_PB <-- L_PMRTH	1,957	1,928	1,015	0,310

Tabel 4 Hasil analisis interaksi komponen pendukung politik

Interaksi Komponen	Nk	S.E.	C.R.	P
X11 <-- POLITIK	-0,792	0,389	-2,037	0,042
X12 <-- POLITIK	5,180	1,864	2,779	0,005
X13 <-- POLITIK	-0,809	0,397	-2,041	0,041
X14 <-- POLITIK	1,000			Fix

Tabel 5 Hasil analisis interaksi komponen pendukung lembaga perbankan

Interaksi Komponen	Nk	S.E.	C.R.	P
X21 <-- L_BANK	1,579	0,496	3,183	0,001
X22 <-- L_BANK	1,000			Fix
X23 <-- L_BANK	2,587	0,790	3,273	0,001

Tabel 6 Hasil analisis interaksi komponen pendukung *performance* usaha perikanan skala kecil

Interaksi Komponen	Nk	S.E.	C.R.	p
X31 <-- PER_UPSK	1,000			Fix
X32 <-- PER_UPSK	1,158	0,293	3,949	0,000
X33 <-- PER_UPSK	1,546	0,331	4,669	0,000
X34 <-- PER_UPSK	1,713	0,418	4,093	0,000

Tabel 7 Hasil analisis interaksi komponen pendukung lembaga pemerintah

Interaksi Komponen	Nk	S.E.	C.R.	p
X41 <-- L_PMARTH	0,164	0,067	2,437	0,015
X42 <-- L_PMARTH	1,000			Fix
X43 <-- L_PMARTH	0,078	0,043	1,821	0,069

Tabel 8 Hasil analisis interaksi komponen pendukung kinerja pembiayaan

Interaksi Komponen	Nk	S.E.	C.R.	P
Y1 <-- KINERJA_PB	1,000			Fix
Y2 <-- KINERJA_PB	0,196	0,075	2,615	0,009

Tabel 9 Matriks interaksi komponen pembiayaan perikanan skala kecil di Kota Tegal

BERPENGARUH POSITIF (+)	
Sifat Pengaruh : Signifikan	Sifat Pengaruh : Tidak Signifikan
<ul style="list-style-type: none"> Lembaga Perbankan (L_Bank) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi/KPPE (X12) Bank Umum (X21) Bank Pembangunan Daerah /BPD (X23) Nilai <i>Net B/C</i> UPSK (X32) Evaluasi Kinerja Berdasarkan jumlah kredit (Y2) Nilai <i>IRR</i> UPSK (X33) Nilai <i>ROI</i> UPSK (X34) Peran KKP RI (X41) 	<ul style="list-style-type: none"> Bank Perkreditan Rakyat /BPR (X22) Penguatan Modal Usaha Kelompok / PMUK (X14) Nilai <i>NPV</i> UPSK (X31) Peran DKP Kota Tegal (X42) Peran BAPPEDA Kota Tegal (X43) Evaluasi Kinerja Berdasarkan Pendapatan (Y1)
BERPENGARUH NEGATIF (-)	
Sifat Pengaruh : Signifikan	Sifat Pengaruh : Tidak Signifikan
<ul style="list-style-type: none"> Kredit usaha kecil /KUR (X11) Bantuan pinjaman langsung masyarakat /BLPM (X13) 	<ul style="list-style-type: none"> Kebijakan Politik <i>Performance</i> UPSK (PER_UPSK)

bank perkreditan rakyat (BPR), maupun bank pembangunan daerah (BPD) merupakan pemilik modal dan sepenuhnya diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menentukan jenis pembiayaan yang diberikan kepada nasabah termasuk usaha perikanan skala kecil. Bank Indonesia (2007), menyatakan lembaga perbankan diberi kewenangan untuk mengembangkan jenis kredit/pembiayaan yang bisa disalurkan untuk mendukung usaha kecil dan menengah, dan oleh karenanya keberhasilan pembiayaan sangat bergantung pada skema yang diterapkannya.

Kegiatan bisnis perikanan, dalam hal ini usaha perikanan skala kecil (Tabel 3), secara makro dapat mempengaruhi kinerja pembiayaan, selama produktivitas usaha perikanan tersebut baik. Usaha perikanan yang dinyatakan layak secara finansial menjadi indikasi baiknya produktivitas usaha perikanan tersebut

dalam mengelola pembiayaan yang ada. Saat ini, *performance* usaha perikanan skala kecil cenderung berpengaruh negatif terhadap kinerja pembiayaan ($RK = -1,065$) yang menunjukkan bahwa usaha perikanan tersebut belum dapat dipercaya dalam mengelola pembiayaan yang diberikan. Ini perlu menjadi perhatian penting dalam pengembangan strategi pembiayaan, dimana manajemen dan *performance* usaha perlu terus diperbaiki. Secara makro, lembaga pemerintah dan kebijakan politik yang dikeluarkannya tidak berpengaruh banyak bagi peningkatan kinerja pembiayaan. Hal tersebut diduga karena lembaga ini tidak secara teknis menangani urusan pembiayaan usaha dan juga tidak berkaitan langsung dengan operasional bisnis perikanan. Menurut Sutisna (2007) dan Hamdan *et al.* (2006) menyatakan bahwa lembaga pemerintah termasuk KKP tidak mempunyai kewenangan untuk mengintervensi penyaluran kredit/pembiayaan yang dibutuhkan oleh

pelaku langsung usaha perikanan tangkap. Lembaga pemerintah mempunyai lingkup tugas yang luas yang bersifat mengayomi, mengatur, dan menetapkan regulasi.

Pola interaksi operasional untuk peningkatan kinerja pembiayaan

Komponen yang berinteraksi makro di atas, pada tingkat operasional akan mempunyai pola interaksi tersendiri secara internal. Oleh karena itu, meskipun secara makro tidak terlihat perannya, tetapi pada tingkat operasional internal ada yang signifikan mendukung pembiayaan. Misalnya pada komponen politik (Tabel 4), kebijakan terkait pelaksanaan kredit usaha kecil/KUR (X11), kredit ketahanan pangan dan energi/KKPE (X12), dan bantuan pinjaman langsung masyarakat/BPLM (X13) mempengaruhi secara signifikan komponen politik tersebut untuk mendukung kinerja pembiayaan. Namun dari tiga jenis kebijakan pembiayaan tersebut, hanya kredit ketahanan pangan dan energi/KKPE (X12) yang sampai saat ini dapat meningkatkan kinerja pembiayaan secara signifikan ($n_k=5,180$ dan $p=0,005$). Terkait dengan ini, lembaga perbankan yang diberi mandat oleh pemerintah untuk menyalurkan kredit ketahanan pangan dan energi/KKPE tersebut harus maksimal dalam mengelola kredit. Sehingga dampak nyata peningkatan kinerja pembiayaan terus dipertahankan dan manfaat kredit dapat dirasakan oleh kelompok usaha kecil termasuk pada bidang perikanan tangkap di Kota Tegal (Imron 2008 dan Setiawan *et al.* 2007).

Dari tiga lembaga perbankan yang berperan dalam pembiayaan di Kota Tegal, hanya bank perkreditan rakyat (BPR) yang belum terlihat nyata dukungannya bagi pembiayaan pada usaha perikanan skala kecil ($p_{X22}=\text{fix}$, sangat besar). Meskipun tidak banyak, Bank umum (seperti BRI dan BPD) telah lama dimanfaatkan oleh nelayan untuk mendukung pembiayaan usaha. Informasi yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa nelayan pernah mendapat bantuan pembiayaan skala kecil (misalnya Rp 15 juta) dan skala besar (Rp 200 juta).

Berdasarkan Tabel 6, Evaluasi *Net B/C* (X32), *IRR* (X33), dan *ROI* (X34) mempunyai pengaruh signifikan bagi produktivitas usaha dan peningkatan kinerja pembiayaan perikanan skala kecil Kota Tegal. Menurut Hanley dan Spash (1993), nilai *Net B/C*, *IRR*, dan *ROI* memberi informasi lengkap *performance* usaha ekonomi tentang perimbangan penerimaan-pengeluaran, sejauhmana investasi suatu usaha ekonomi mampu memberikan keun-

tungan di atas suku bunga, serta sejauh mana usaha ekonomi mengembalikan modal yang ditanamkan. Makino *et al.* (2009) menyatakan bahwa usaha perikanan dengan *performance* baik dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan ekonomi pesisir dan upaya konservasi terhadap ekosistem sumberdaya hayati. Berkaitan dengan peran lembaga pemerintah, saat ini hanya KKP RI yang signifikan dapat meningkatkan kinerja pembiayaan usaha perikanan skala kecil. Hal ini karena KKP RI menjadi lembaga yang menangani urusan perikanan serta mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang dibutuhkan dalam pengelolaan usaha perikanan. Peran lembaga pemerintah ini harus diselaraskan dengan program pembiayaan lembaga perbankan (terutama bank umum dan BPD), sehingga kinerja pembiayaan dapat meningkat dan usaha perikanan skala kecil di Kota Tegal lebih berkembang. Saat ini, kinerja pembiayaan dalam bentuk peningkatan jumlah kredit yang terserap menjadi ukuran realistik dan signifikan bagi keberhasilan pembiayaan usaha perikanan skala kecil di Kota Tegal.

Berdasarkan Tabel 9, sebanyak 15 dari 19 komponen interaksi pembiayaan memberikan pengaruh positif. Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan perikanan skala kecil di Kota Tegal telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan secara makro dan teknis untuk pengembangannya. Berbagai komponen yang pengaruhnya negatif dapat dievaluasi kembali, apa yang menjadi penyebab belum mendukung secara positif kinerja pembiayaan yang ada. Bank Indonesia (2007) menyatakan bahwa semua komponen yang terkait kredit/pembiayaan perlu diupayakan mendukung kelancaran kredit, sehingga penyaluran kredit pada investasi sektor riil berhasil maksimal. Sedangkan menurut Pomeroy dan Berkes (1997), pemerintah perlu mengambil peran penting sebagai mediator dan motivator untuk membangun partisipasi bersama dalam mendukung kegiatan perikanan, termasuk dalam pembiayaannya. PEMDA, KKP, dan perbankan perlu mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengurangi pengaruh negatif dalam interaksi pembiayaan perikanan skala kecil di Kota Tegal.

KESIMPULAN

Peran lembaga perbankan dalam lingkup makro signifikan mempengaruhi naik-turunnya kinerja pembiayaan, sedangkan kebijakan politik, *performance* usaha perikanan skala kecil, dan peran lembaga pemerintah tidak

signifikan. Pada tataran teknis, penyaluran kredit/pembiayaan oleh bank umum (BRI dan BPD) secara signifikan mendukung peran lembaga perbankan dan dapat meningkatkan kinerja pembiayaan, sedangkan BPR belum meningkatkan kinerja pembiayaan. Jenis kredit/pembiayaan yang manfaatnya signifikan dirasakan nelayan kecil adalah kebijakan politik menyangkut KKPE, sedangkan KUR dan BPLM tidak dirasakan manfaatnya oleh nelayan kecil. Program KKP RI signifikan membantu peningkatan kinerja pembiayaan melalui berbagai program penyuluhan, bimbingan teknis, dan pendampingan yang diberikan di Kota Tegal, sedangkan program yang dicanangkan BAPPEDA dan DKP Kota Tegal belum memberikan hal tersebut. *Performance* dari dimensi *Net B/C*, *IRR*, dan *ROI* dapat meningkatkan produktivitas usaha perikanan skala kecil dan kinerja pembiayaan yang dimanfaatkannya. Peningkatan jumlah kredit merupakan parameter yang paling tepat untuk evaluasi kinerja pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan. Secara umum, pembiayaan perikanan skala kecil di Kota Tegal telah berjalan dengan baik dan mendapat dukungan secara makro dan teknis untuk pengembangannya.

DAFTAR PUSTAKA

- [BPS] Badan Pusat Statistik. 2010. *Data Statistik Perikanan Indonesia Tahun 2009*. Jakarta.
- [BI] Bank Indonesia. 2007. Pengembangan Kredit Usaha Kecil dan Menengah dalam Mendukung Investasi di Sektor Rill [Internet]. Tersedia pada: www.bi.co.id.
- Cochrane KL. 2002. *A Fishery Manager's Guidebook. Management Measures and Their Application. Senior Fishery Resources Officer. Fishery Resources Division*. Rome: FAO Fisheries Department. 231 p.
- Elfindri. 2002. *Ekonomi Patron klien: Fenomena Mikro Rumah Tangga Nelayan dan Kebijakan Makro*. Padang: Andalas University Press.
- Ferdinand A. 2002. *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
- Glass NM. 1991. *Proactive Management: How to Improve Your Management Performance*. East Brunswick, NJ: Nichols Publishing.
- Hanley ND, Spash C. 1993. *Cost-Benefit Analysis and the Environment*. UK: Edward Elgar. Cheltenham.
- Hamdan, Monintja DR. 2006. Analisis kebijakan pengelolaan perikanan tangkap ber-kelanjutan di Kabupaten Indramayu, Pro-vinsi Jawa Barat. *Buletin PSP*. 15(3): 86-101.
- Imron M. 2008. Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan Demersal yang Berkelanjutan di Perairan Tegal, Jawa Tengah [disertasi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- [KKP] Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2010. *Kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Sektor Perikanan*. Jakarta: Kantor Pusat Data, Statistik, dan Informasi, KKP RI.
- Makino M, Matsuda H, Sakurai Y. 2009. Expanding Fisheries Co-management to Ecosystem Based management : A case in the Shiretoko World Natural Heritage Area, Japan. *Journal of Marine Policy*. P 207–214.
- Pomeroy RS, Berkes F. 1997. Two to Tango: The Role of Government in Fisheries Co-Management. *Journal of Marine Policy*. 21(5): 465-480.
- Setiawan I, Monintja DR, Nikijuluw VPH, Sondita MFA. 2007. Analisis Ketergantungan Daerah Perikanan sebagai Dasar Pelaksanaan Program Pemberdayaan Nelayan: Studi Kasus di Kabupaten Cirebon dan Indramayu. *Buletin PSP*. 16(2): 188-200.
- Sutisna SM, Monintja DR, Tarumengkeng RC, Hubeis AVS. 2007. Analisis Gender terhadap Kegiatan Perikanan Pantai Kabupaten Subang, Jawa Barat. *Buletin PSP*. 16(1): 105-119.
- Wicaksono A. 2012. Genjot Pelanggan, IM2 Bisik pasar UMKM. Tersedia pada: <http://industri.kontan.co.id/news/genjot-pelanggan-im2-bidik-pasar-umkm>.